



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) PERUBAHAN TAHUN 2024

**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Kalimantan Tengah**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Perubahan Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Perubahan Tahun 2024 DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah merupakan acuan kerja dalam melaksanakan kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Perubahan Tahun 2024 ini mengacu pada rencana pelaksanaan program kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2021-2026 DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan disusun dengan memperhatikan kewenangan institusi serta perkembangan yang ada di lingkungan internal dan eksternal, sehingga mampu meningkatkan kinerja dan fungsi DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Perubahan Tahun 2024 DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi pengembangan organisasi lebih lanjut guna mendukung pembangunan daerah, harapan yang lebih luas semoga kinerja DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 10 Juni 2024

Kepala Dinas DP3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah



dr. **LINA VICTORIA ADEN, M.M.Kes**
Pembina Muda
NIP. 19680717 199903 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Umum 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 3

1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan capaian Renstra PD 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD 12

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PDAnatomi Fisiologi 13

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah 28

2.3.2 Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DP3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah 33

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD 38

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat..... 47

BAB III TUJAN DAN SASARAN..... 52

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 52

3.1.1 Kementerian PPPA 52

3.1.2 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 57

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja PD Tahun 2024 PD 68

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 72

4.1 Program dan Kegiatan 72

BAB V PENUTUP 83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. proses Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 terdiri dari 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan akhir, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan renja.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Kerja PD Tahun 2024 sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dokumen perencanaan PD DP3APPKB untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Kerja DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi rencana Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana Kerja Tahun 2024 DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun menjabarkan tujuan dan sasaran strategi dan kebijakan serta arah pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2021–2026.

Rencana Kerja Tahun 2024 DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah tahun berfungsi menerjemahkan, mengoperasikan RKPD ke dalam program dan kegiatan PD sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan

capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam RENSTRA 2021-2026 mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021;
10. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Tahun 2024 DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah ini disusun dengan maksud :

- 1. Menjabarkan rencana strategis DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dikaitkan dengan hasil kajian isu strategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2024.
- 2. Menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2024.
- 3. Mengukur kinerja pelayanan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Sedangkan tujuan penyusunan RENJA Tahun 2024 DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebagai berikut :

- 1. Mengetahui permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
- 2. Mengetahui tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.
- 3. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024;
- 4. Menyediakan dokumen untuk perwujudan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah disusun dalam sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi tentang evaluasi pelaksanaan RENJA PD tahun lalu dan capaian Renstra perangkat daerah, Analisis kinerja pelayanan PD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, Review terhadap rancangan akhir RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran RENJA PD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan akhir RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya, serta tabel rencana program dan kegiatan

BAB V PENUTUP

Berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan capaian Renstra PD

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 DP3APPKB disusun berdasarkan analisa kondisi objektif permasalahan pembangunan saat ini, analisa kondisi objektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi PD. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi perangkat daerah saat ini serta estimasi kondisi yang akan datang.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian pada tahun berjalan pada bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk evaluasi program dan kegiatan tahun 2024. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan RENJA Tahun 2023 DP3APPKB dijabarkan *pada* **tabel 2.1:**

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2023 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan/ Tahun 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun RKPD Tahun 2023 (%)		
					K		Rp	K		Rp	K		Rp
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah												
		02.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (%)	100	%	12.214.000.558	275	%	27.210.915.967	45,83	%	203,30
		2.8.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	%	251.469.756	275	%	499.432.356	45,83	%	96,05
		2.8.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen RENJA SKPD	1	Dokumen	36.553.877	4	Dokumen	74.919.550	66,67	%	72,26
		2.8.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD	1	Dokumen	28.946.077	4	Dokumen	70.557.000	66,67	%	73,44
		2.8.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen LAKIP SKPD	1	Dokumen	31.516.476	2	Dokumen	84.523.000	33,33	%	85,68
		2.8.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Rapat Koordinasi Perencanaan dan Rapat Evaluasi dengan Kab/Kota se-Kalimantan Tengah	1	Dokumen	154.453.326	2	Dokumen	269.432.806	33,33	%	121,59
		2.8.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	%	7.326.232.541	275	%	16.313.798.032	45,83	%	214,80
		2.8.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12	Bulan	7.240.577.937	30	Bulan	16.190.922.752	41,67	%	220,88
		2.8.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan SKPD	1	Dokumen	13.577.302	5	Dokumen	28.577.100	83,33	%	27,72
		2.8.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Dokumen Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik SKPD	1	Dokumen	72.077.302	6	Dokumen	94.298.180	100,00	%	58,36
		2.8.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100	%	31.231.906	200	%	26.146.100	33,33	%	8,72
		2.8.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah bulan penyediaan	12	Bulan	31.231.906	33	Bulan	26.146.100	45,83	%	8,54
		2.8.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	%	70.873.906	275	%	42.902.860	45,83	%	12,64
		2.8.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah bulan penyediaan	12	Bulan	70.873.906	33	Bulan	42.902.860	45,83	%	12,41
		2.8.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	%	1.411.411.281	275	%	3.805.237.244	45,83	%	282,36
		2.8.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan	12	Bulan	29.537.132	33	Bulan	54.129.200	45,83	%	79,72
		2.8.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan	12	Bulan	43.033.129	26	Bulan	1.384.975.750	36,11	%	1701,59
		2.8.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan	12	Bulan	38.033.129	33	Bulan	116.874.050	45,83	%	152,99
		2.8.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan	12	Bulan	42.283.129	33	Bulan	44.420.000	45,83	%	55,08

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2023 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan/ Tahun 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun RKPD Tahun 2023 (%)		
					K		Rp	K		Rp	K		Rp
		2.8.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan penyediaan	12	Bulan	33.033.129	33	Bulan	446.700.000	45,83	%	625,69
		2.8.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan	12	Bulan	772.248.504	33	Bulan	1.611.118.244	45,83	%	194,97
		2.8.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah bulan penyediaan	12	Bulan	453.243.129	21	Bulan	147.020.000	29,17	%	102,38
		2.8.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah (%)	100	%	1.265.909.794	175	%	1.583.314.155	29,17	%	178,06
		2.8.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset SKPD (Tahun)	1	Dokumen	1.106.293.841	1	Dokumen	1.303.967.250	16,67	%	219,03
		2.8.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Tahun)	1	Dokumen	159.615.953	1	Dokumen	279.346.905	16,67	%	95,06
		2.8.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	%	1.745.799.468	275	%	2.946.090.344	45,83	%	146,26
		2.8.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan	12	Bulan	12.077.302	33	Bulan	23.082.250	45,83	%	22,72
		2.8.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan	12	Bulan	540.622.464	33	Bulan	520.636.344	45,83	%	82,62
		2.8.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan	12	Bulan	1.193.099.702	33	Bulan	2.402.371.750	45,83	%	187,30
		2.8.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)	100	%	111.071.906	275	%	204.469.135	45,83	%	53,87
		2.8.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan penyediaan	12	Bulan	60.615.953	33	Bulan	144.839.135	45,83	%	74,32
		2.8.01.1.08.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan penyediaan	12	Bulan	50.455.953	33	Bulan	59.630.000	45,83	%	32,28
2	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	02.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah Focal Point PUG SKPD di Provinsi Kalimantan Tengah	30	Orang	1.609.201.977	80	Orang	3.094.638.512	181,82	%	198,44
		2/08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	1	Dokumen	201.335.313	2	Dokumen	437.281.926	33,33	%	133,94
		2.08.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen ARG SKPD	20	Dokumen	74.278.437	18	Dokumen	181.476.314	51,43	%	156,45
		2.08.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Monev PUG di Kab/ Kota Provinsi	8	Kab/Kota	74.278.437	14	Kab/Kota	203.682.210	127,27	%	175,60
		2.08.02.1.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Dokumen Hasil Rakor	1	Dokumen	52.778.439	1	Dokumen	52.123.402	16,67	%	55,16
		2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksaasn Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	1	Dokumen	1.366.588.225	1	Dokumen	2.598.605.786	16,67	%	225,96
		2.08.02.1.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang	Dokumen Hasil Kegiatan Peningkatan Partisipasi	5	Dokumen	1.263.278.437	6	Dokumen	2.383.556.636	20,00	%	237,17

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2023 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan/ Tahun 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun RKPD Tahun 2023 (%)		
					K		Rp	K		Rp	K		Rp
			Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Perempuan di Bidang Politik,Hukum.Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi									
		2.08.02.1.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Dokumen Hasil Promosi	3	Dokumen	103.309.788	1	Dokumen	215.049.150	5,56	%	148,28
		2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	1	Dokumen	41.278.439	0	Dokumen	58.750.800	0,00	%	70,79
		2.08.02.1.03.02	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	Jumlah Perempuan UMKM Menengah yang dilatih	25	Orang	41.278.439	20	Orang	58.750.800	333,33	%	70,79
3	Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	02.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan	87,5	%	1.132.536.131	243,75	%	1.695.325.533	256,58	%	190,53
		2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak	1	Dokumen	600.159.204	1	Dokumen	963.683.344	16,67	%	221,66
		2.08.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten yang SDM nya terlatih dalam Bimbingan Tekhnis dan Supervisi Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dan TPPO	6	Kab/Kota	50.362.102	4	Kab/Kota	151.368.800	28,57	%	204,10
		2.08.03.1.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	6	Kab/Kota	549.797.102	4	Kab/Kota	812.314.544	28,57	%	225,27
		2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan Layanan korban kekerasan	1	Dokumen	230.059.781	1	Dokumen	564.003.189	16,67	%	203,13
		2.08.03.1.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya barang dan jasa penunjang pelayanan korban kekerasan perempuan dan anak pada UPT PPA	12	Bulan	137.098.679	33	Bulan	296.657.763	45,83	%	184,37
		2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Dokumen pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan	1	Dokumen	92.961.102	2	Dokumen	267.345.426	33,33	%	228,97
		2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	1	Dokumen	302.317.146	1	Dokumen	167.639.000	16,67	%	94,52
		2.08.03.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi	Jumlah SDM yang terlatih sebagai Tenaga Pendamping Korban Kekerasan dan pendataan kasus melalui aplikasi simfoni	40	Orang	102.317.146	71	Orang	162.639.000	59,17	%	128,96

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2023 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan/ Tahun 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun RKPD Tahun 2023 (%)		
					K		Rp	K		Rp	K		Rp
			Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi										
		2.08.03.1.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Kebutuhan Spesifik Perempuan	2	Kegiatan	200.000.000	2	Kegiatan	5.000.000	11,11	%	9,76
	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	02.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumah peserta Pelatihan Usaha Perempuan Korban Kekerasan	30	Orang	160.698.705	95	Orang	379.691.450	79,17	%	198,35
		2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang membentuk forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	11	Kab/Kota	75.974.227	14	Kab/Kota	214.963.100	100,00	%	235,36
		2.08.04.1.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang membentuk forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	11	Kab/Kota	75.974.227	30	Kab/Kota	214.963.100	214,29	%	235,36
		2.08.04.1.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG lintas prov dan kab/kota	1	Dokumen	84.724.478	2	Dokumen	164.728.350	33,33	%	164,59
		2.08.04.1.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG lintas prov dan kab/kota	1	Dokumen	84.724.478	2	Dokumen	164.728.350	33,33	%	164,59
4	Mengoptimalkan kualitas data gender dan anak	02.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dokumen hasil program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	12	Dokumen	222.609.900	14	Dokumen	538.390.260	100,00	%	203,04
		2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen pelaksanaan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	1	Dokumen	222.609.900	2	Dokumen	538.390.260	33,33	%	203,04
		2.08.05.1.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Dokumen laporan hasil publikasi data gender dan anak dan laporan Pengembangan Layanan Keterbukaan informasi Publik.	2	Dokumen	69.502.450	4	Dokumen	210.605.168	33,33	%	231,99
		2.08.05.1.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Dokumen profil data terpih gender tingkat provinsi	1	Dokumen	153.107.450	2	Dokumen	327.785.092	33,33	%	187,96
5	Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak	02.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Peningkatan Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria KLA	8	Kab/Kota	931.804.413	15	Kab/Kota	831.432.132	107,14	%	189,91
		2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Persentase Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria KLA	57,14	%	574.409.706	86,71	%	609.126.018	14,45	%	266,67
		2.08.06.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga	Dokumen hasil pelaksanaan Pembinaan dan Bimbingan Pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak	1	Dokumen	500.000.000	2	Dokumen	357.609.518	33,33	%	262,09

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2023 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan/ Tahun 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun RKPD Tahun 2023 (%)		
					K		Rp	K		Rp	K		Rp
		2.08.06.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen hasil Monitoring Evaluasi Pencapaian dan Pelaksanaan KLA	1	Dokumen	74.409.706	2	Dokumen	251.516.500	33,33	%	273,46
		2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	1	Dokumen	357.394.707	2	Dokumen	243.978.614	33,33	%	116,52
		2.08.06.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen hasil Rakornas FAN	1	Dokumen	107.394.707	2	Dokumen	182.028.114	33,33	%	145,67
		2.08.06.1.02.04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil Rapat Koordinasi Forum Anak Provinsi (Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi)	1	Dokumen	250.000.000	1	Dokumen	61.950.500	16,67	%	73,37
		02.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Anak dari tindak kekerasan (%)	55	%	589.622.435	238,33	%	1.093.324.404	340,47	%	155,67
		2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak	1	Dokumen	96.126.741	1	Dokumen	172.554.500	16,67	%	129,06
		2.08.07.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1	Dokumen	96.126.741	2	Dokumen	172.554.500	33,33	%	129,06
		2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi	1	Dokumen	493.495.694	1	Dokumen	870.415.554	16,67	%	153,07
		2.08.07.1.02.01	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dokumen pelaksanaan kegiatan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	1	Dokumen	121.578.742	2	Dokumen	326.959.450	33,33	%	205,44
		2.08.07.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (DAK)	Dokumen pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	1	Dokumen	371.916.952	2	Dokumen	543.456.104	33,33	%	132,72
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		0	dokumen	0	1	dokumen	50.354.350	100,00	%	98,15
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		0	dokumen	0	1	dokumen	50.354.350	100,00	%	98,15
6	Meningkatkan kualitas keluarga	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran Total/total fertility Rate (TFR)	2,06	-	202.446.846	4,48	-	174.632.800	228,57	%	72,42
		2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka	Dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah	1	Dokumen	202.446.846	1	Dokumen	174.632.800	16,67	%	72,42

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2023 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan/ Tahun 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun RKPD Tahun 2023 (%)		
					K		Rp	K		Rp	K		Rp
			Pengendalian Kuantitas Penduduk	Provinsi dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk									
		2.14.02.1.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen hasil Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	1	Dokumen	151.984.773	1	Dokumen	119.681.900	16,67	%	69,85
		2.14.02.1.01.03	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Dokumen hasil Advokasi dan Sosialisasi GDPK	1	Dokumen	50.462.073	1	Dokumen	84.050.300	16,67	%	120,39
7	Meningkatnya akseptor KB	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	5,18	%	64.222.990	25,1	%	198.816.550	501,00	%	119,45
		2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen hasil pengembangan design program, pengelolaan dan pelaksanaan Advokasi, KIE, Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	1	Dokumen	27.883.045	2	Dokumen	149.139.100	33,33	%	223,42
		2.14.03.1.01.02	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah kegiatan KIE PP,KB dan Pembangunan Keluarga	2	Kegiatan	27.883.045	2	Kegiatan	149.139.100	16,67	%	223,42
		2.14.03.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Dokumen Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1	Dokumen	36.339.945	1	Dokumen	755.873.052	16,67	%	758,17
		2.14.03.1.02.03	Pembinaan Promosi Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Dokumen hasil Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK	1	Dokumen	36.339.945	1	Dokumen	755.873.052	16,67	%	758,17
	Meningkatkan kualitas keluarga	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	62,44	-	2.000.000.000	108,02	-	818.698.702	167,34	%	457,49
		2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen hasil pelaksanaan pelaksanaan design program pembangunan keluarga	1	Dokumen	2.000.000.000	1	Dokumen	141.602.500,00	16,67	%	79,13
		2.14.04.1.01.14	Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyipan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Kabupaten / Kota yang mendapatkan Fasilitas, Pembimbingan , Pengembangan dan Penguatan Pengasuhan 1000 HPK	3	Kab/Kota	2.000.000.000	12	Kab/Kota	141.602.500,00	66,67	%	%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Analisis Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD) Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, maupun terhadap IKK yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dimana didalamnya diterangkan jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk menganalisa kinerja pelayanan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada SPM dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), dengan sasaran target sesuai dengan renstra SKPD dan/atau berdasarkan analisis standar kebutuhan pelayanan. Kinerja pelayanan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan indikator kinerja antara lain :

1. Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dalam lingkup Pengarusutamaan Gender (PUG)
 - a) Kebijakan berupa Peraturan Daerah
 - b) Penguatan Kapasitas Jaringan Pengarusutamaan Gender melalui Sosialisasi PUG mengenai konsep gender, kesetaraan dan keadilan gender (KKG), Anggaran Responsif Gender (ARG), Pelatihan Fasilitator PUG dan Pelatihan Pendampingan dan Advokasi Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), Pendampingan dan konsultasi penyusunan Renstra/Renja SKPD yang responsif gender.
 - c) Ketersediaan data gender dan anak.
 - d) Kemitraan dan jaringan antara organisasi yang ada di dalam dan antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
 - e) Integrasi pengarusutamaan gender ke dalam kebijakan utama pembangunan, sebagaimana arah kebijakan pembangunan nasional agar pembangunan yang dilaksanakan di tiap sektor dapat saling berkorelasi dan memberikan manfaat sosial kepada masyarakat (laki-laki maupun perempuan) dengan memperhatikan aspek kesetaraan, keadilan dan keberlanjutan.
2. Pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak
 - a) Upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan kepada perempuan dan anak yang bersifat pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan berupa Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

KorbaKekerasan. Peraturan daerah ini bersifat spesifik hanya memberikan perlindungan kepada Perempuan dan anak korban dan Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- b) Upaya pengembangan lembaga layanan melalui penguatan dan peningkatan kapasitas jaringan serta peningkatan sumber daya manusia yang terlatih melalui berbagai pendidikan dan pelatihan untuk menangani upaya pencegahan dan tindak kekerasan pada perempuan dan anak. Dengan didukung alokasi anggaran dari pemerintah daerah, masyarakat dan peran serta dunia usaha secara terus menerus dan berkelanjutan.
 - c) Data terkait tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak disediakan oleh lembaga layanan perempuan dan anak berupa UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dan yang selanjutnya diformulasikan oleh DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah untuk dilaporkan setiap tahunnya.
 - d) Lembaga layanan untuk perlindungan perempuan dan pemenuhan haknya diantaranya adalah UPT PPA, LSM pemerhati perempuan dan berbagai panti sosial dan pusat rehabilitasi milik Instansi Vertikal.
 - e) Kebijakan Pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak antara lain dengan adanya penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pemenuhan hak anak diharapkan mampu menjadi pijakan dalam rangka memperkuat komitmen dan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak
3. Pelaksanaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- a) Program Keluarga Berencana bertujuan menurunkan laju pertumbuhan penduduk yang dilakukan antara lain melalui pengendalian kelahiran. Adapun kegiatan tersebut yaitu Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KB Nasional. Kegiatan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Program KB Nasional ditujukan untuk meningkatkan KIE Program KB.
 - b) Kegiatan meningkatkan kemandirian dan kualitas keluarga di masyarakat dalam melaksanakan program KB dan meningkatkan keluarga bahagia dan sejahtera.
 - c) Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Jaringan KB yang telah dilaksanakan adalah kegiatan khusus seperti Hari Keluarga Nasional (Harganas).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis

adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, maka tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana.
4. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengarusutaman gender dan Pemberdayaan Perempuan.
5. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
6. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi perlindungan dan tumbuh kembang anak;
7. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk;
8. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
9. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, pelatihan, penelitian dan pengembangan;

10. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi penyusunan informasi data;
11. pengelolaan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya ;
12. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggungjawab.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. penetapan kebijakan daerah, koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) skala provinsi ;
2. koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala provinsi ;
3. penyelenggaraan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan skala provinsi ;
4. fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan terhadap kekerasan, tenaga kerja, perempuan lansia, perempuan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik skala provinsi ;
5. penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi ;
6. fasilitasi pengembangan dan penguatan lembaga atau organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi ;
7. koordinasi pelaksanaan sistem informasi gender dan anak skala provinsi;
8. kompilasi data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala provinsi menyangkut komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);
9. penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan Anak skala provinsi ;
10. penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi ;
11. penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi ;
12. penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan penguatan pelemagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala provinsi ;

13. penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) skala provinsi ;
14. penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga berencana ;
15. pelaksanaan kebijakan terpadu antara perkembangan penduduk (aspek kualitas, kuantitas dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan; dan
16. penyerasian kebijakan kependudukan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 2 (dua) hal yang menjadi perhatian, antara lain :

Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Identifikasi permasalahan pada pelayanan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat kita lihat pada Tabel 2.1.:

Tabel 2.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Menurunnya Indeks Pembangunan	Kurangnnya peran perempuan dalam pembangunan	Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan belum menjadi mainstream bagi seluruh SKPD dan Pemerintah Kabupaten/ Kota
			Kurangnnya kapasitas perempuan dalam bidang ekonomi dan politik

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosiokultural masyarakat yang diwarnai penafsiran terjemahan ajaran agama yang bias gender. Kurangnya optimalnya peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender
			Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga yang resposif gender
2	Keterbatasan akses terhadap referensi isu gender pada berbagai bidang pembangunan	Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pemberdayaan perempuan	Belum optimalnya sistem pelaksanaan PUG dalam peformulaan dan pelaksanaan kebijakan.
3	Keterbatasan SDM, baik kuantitas dan kualitas yang dapat memberikan bantuan teknis pelaksanaan PPRG di Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota	Kompetensi SDM dan sarana kurang mendukung	Pemahaman dan persepsi SDM aparatur pemerintah provinsi, kabupaten dan kota tentang PUG yang masih terbatas, serta koordinasi antara Dinas PPPA, Bappedalitbang, Badan Keuangan Daerah, dan Inspektorat yang masih kurang telah menyebabkan perannya sebagai gender <i>machinery</i> di daerah belum optimal
4	Belum optimalnya penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender yang berdampak pada ketersediaan anggaran	Sebagian besar perangkat daerah masih belum memahami dan menyadari pentingnya mengintegrasikan perspektif gender bagi pembangunan daerah	Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG, PPRG untuk ARG
5	Data terpilah gender yang belum <i>valid</i> dan <i>update</i> .	Kurang nya koordinasi dalam pengumpulan data antara Kab/Kota dan instansi terkait, mengenai data terpilah Gender dan Anak	Kurang nya SDM yang memahami utk pengumpulan data/ penginputan data Pengumpulan data Gender dan anak belum tersistem dan belum dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan di semua sektor
6	Belum terbentuknya Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan	Kurangnya pemahaman dari kabupaten/kota peran dan fungsi untuk	Minimnya anggaran dalam mendukung pembentukan forum di tingkat kabupaten/kota

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Perempuan dan Anak beberapa kabupaten/kota	pembentukan Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	
7	Belum terwujudnya Kalimantan Tengah Layak Anak	Belum optimalnya pemenuhan hak anak melalui pemenuhan Indikator Kabupaten/ kota Layak Anak dengan capaian indikator pemenuhan I Hak Anak >500	Pengarusutamaan hak anak belum menjadi mainstream bagi lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha
			Kurangnya optimalnya peningkatan kualitas keluarga yang responsif hak anak
			Belum optimalnya partisipasi anak dalam pembangunan
			Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak dan keluarga yang responsif hak anak
			Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pemenuhan hak anak
8	Tingginya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kasus kekerasan terhadap perempuan masih tinggi	Belum optimalnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
			Belum optimalnya penanganan perlindungan bagi perempuan dan anak kelompok rentan sebagai upaya pengurangan risiko
			Belum optimalnya kualitas layanan lembaga penyedia layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
9	Belum optimalnya sumber daya pendukung dalam pelaksanaan pelayanan UPT PPA	Kompetensi SDM belum sesuai dengan kebutuhan layanan UPT serta belum memadai sarana pendukung seperti gedung perkantoran, etalase pelayanan dan belum tersedia rumah aman.	Minimnya dukungan UPT PPA sebagai UPT yang menerima berbagai kasus yang kompleks, yang harusnya ditangani secara komprehensif, mengingat fungsinya sebagai rujukan lanjutan.
10	Tingginya Angka kelahiran total		Rendahnya kesertaan KB yang menggunakan alat kontrasepsi MKJP

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Menurunnya rasio pemakaian kontrasepsi.	Belum optimalnya penggerakan KB bersama mitra kerja dan pengembangan KIE
			Budaya dan agama tertentu yang tidak menyetujui tentang penggunaan kontrasepsi
11	Stunting pada anak	Masih tingginya prevalensi <i>stunting</i>	Masih minimnya pemahaman keluarga tentang <i>stunting</i>
			Praktek pengasuhan yang kurang baik
12	Pernikahan pada usia anak	Belum optimalnya pendewasaan usia pernikahan	Belum optimalnya sosialisasi tentang 8 fungsi keluarga dalam mendukung ketahanan keluarga
			Kurangnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan perkawinan usia dini
			Belum optimalnya peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang ingin diwujudkan pada periode 2021 -2026 adalah :

VISI :

“Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”

MISI :

- 1). *Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan;*
- 2). *Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global;*
- 3). *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi*

Birokrasi;

- 4). *Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing;*
- 5). *Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender.*

Mengacu pada **Misi Keempat** yaitu “**Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing**” dan **Misi Kelima** yaitu “**Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender**”.

Pokok Misi keempat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan akses layanan Pendidikan secara merata, berkualitas, dan berkeadilan melalui tunjangan beasiswa untuk warga kurang mampu, termasuk pengiriman putra putri daerah berprestasi untuk kuliah keluar daerah Kalteng hingga Luar Negeri;
- 2) Menyediakan layanan Pendidikan khusus untuk wilayah terpencil, terbelakang, atau di daerah perbatasan dengan penempatan tenaga pendidik yang berkompeten disertai jaminan kesejahteraan dan peningkatan sarana maupun prasarana Pendidikan yang memadai;
- 3) Mengembangkan Pendidikan vokasi tingkat menengah dan tinggi sesuai kebutuhan di dunia kerja agar produktif dan berdaya saing tinggi;
- 4) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan, biaya gratis bagi pasien kurang mampu dan pengadaan kuantitas maupun kualitas fasilitas kesehatan beserta pengiriman dokter-dokter ke pelosok desa;
- 5) Memperkuat daya saing pemuda dan pelatihan olahragawan potensial melalui
- 6) Peningkatan fasilitas yang memadai agar dapat berkompetensi dalam skala nasional maupun internasional.

Pokok Misi Kelima, dirumuskan sebagai berikut :

- 1). Memperkuat partisipasi tokoh-tokoh lintas agama dan budaya sebagai simpul peradaban umat majemuk dan cinta damai yang berakar pada kearifan lokal falsafah Huma Betang (Rumah Besar);
- 2). Mengembangkan pesantren dan institusi keagamaan lainnya sebagai garda terdepan dalam pembentukan insan Kalteng yang beriman, pancasilais dan cinta damai;
- 3). Menciptakan pemuda yang berkompeten, berakhlakul karimah, berjiwa

- wirausaha dan berkebudayaan, serta berwawasan gender;
- 4). Memperluas partisipasi perempuan sebagai pejabat publik yang berorientasi kesetaraan gender;
 - 5). Mencegah bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan memperkuat perlindungan terhadap perempuan serta anak dari berbagai kekerasan.

Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan **Misi Keempat** dan **Misi Kelima** tersebut di atas menuangkan ke dalam Rencana Strategis secara komprehensif dan berkelanjutan dalam upaya mencapai keberhasilan kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun serta langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Keterkaitan antara tugas dan fungsi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dengan Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih akan dipaparkan secara mendetail. Menelaah Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Hasil dari identifikasi tersebut juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI					
“Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”					
Misi 5					
Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender					
NO.	PERMASALAHAN PELAYANAN DP3APPKB	FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
		PENGHAMBAT	PENDORONG	PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Kesetaraan gender (<i>gender equality</i>) merupakan permasalahan lintas sector (<i>crosscutting issues</i>) yang dilaksanakan melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk meningkatkan askes partisipasi control dan manfaat bagi gender. Namun PUG belum menjadi menjadi sasaran utama dalam pembangunan mulai dari tingkat desa sampai dengan provinsi	Kompetensi SDM dan sarana kurang mendukung	Adanya Tim Koordinasi antara anggota Pokja PUG dan <i>Focal Point</i> Gender sudah berjalan	Pemahaman terhadap gender dan PUG belum optimal baik dari masyarakat, swasta maupun sektor lain	PUG merupakan startegi dalam Kebijakan Pembangunan di Kalimantan Tengah Banyak lembaga masyarakat yang turut ambil bagian dalam PUG
2	Partisipasi Perempuan di Politik sudah baik akan tetapi Perempuan Pengambilan keputusan dalam jabatan publik masih kurang	Masih adanya diskriminasi terhadap perempuan baik dari usaha maupun penentuan menjadi Pejabat Publik	Kesempatan dan peluang untuk Perempuan masih tinggi dengan didukungnya a Perda PUG No 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah	Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap perempuan dalam pembangunan	Adanya UU No. 12 tahun 2013 tentang Pemilu yang mengamanatkan keterwakilan 30% perempuan di Lembaga Legislatif

VISI “Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”					
Misi 5 Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender					
NO.	PERMASALAHAN PELAYANAN DP3APPKB	FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
		PENGHAMBAT	PENDORONG	PENGHAMBAT	PENDORONG
3	Banyaknya pelaku ekonomi perempuan di sektor informal yang belum terdata dan cenderung rendah	Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap pendidikan dan pelatihan bagi kaum perempuan	Koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait		
4	Data terpilah gender yang belum <i>valid</i> dan <i>update</i>	Kurang nya SDM yang memahami utk pengumpulan data/ penginputan data	Adanya Tim Penyusun Data Terpilah	Belum semua perangkat daerah mempunyai data terpilah	Dukungan pemerintah daerah dalam keterbukaan informasi publik berbasis aplikasi
5	Pemenuhan Hak Anak yang dituangkan dalam 5 klaster dan 24 Indikator Kabupaten/kota Layak Anak belum dipahami oleh banyak sektor sebagai upaya pemenuhan Hak Anak yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah di semua bidang.	Kompetensi SDM dan sarana kurang mendukung	Adanya Advokasi, sosialisasi serta Koordinasi tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak ke tingkat pusat dan kabupaten/kota	Belum semua sektor memahami pemenuhan hak anak melalui 5 klaster dan 24 indikator	Banyak lembaga masyarakat yang turut ambil bagian dalam PUHA
6	Maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	1. Rendahnya pendidikan dan kualitas hidup masyarakat 2. Masih adanya pemahaman masyarakat bahwa kekerasan merupakan aib keluarga sehingga mereka enggan melaporkan kasus nya.	Koordinasi dan kerjasama dengan SKPD terkait	1. Implementasi Peraturan Perundang-undangan belum optimal 2. Belum terbentuknya kelompok masyarakat untuk peduli dan membantu penanganan kasus kekerasan 3. Adanya kemajuan teknologi, menyebabkan	1. Adanya Perda No. 05 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak 2. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 3. UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT 4. Koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan LSM yang

VISI “Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”					
Misi 5 Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender					
NO.	PERMASALAHAN PELAYANAN DP3APPKB	FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
		PENGHAMBAT	PENDORONG	PENGHAMBAT	PENDORONG
		3. Kurangnya pemahaman masyarakat akan UU perlindungan perempuan dan anak		kan anak – anak dengan mudanya mengakses <i>social media</i> , yang tidak diimbangi dengan pengawasan dari orang tua	menangani perlindungan perempuan dan anak
7	Belum optimalnya pelayanan UPT PPA	Terbatasnya kouta penerimaan ASN yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan UPT PPA	Sosialisasi secara berkala tentang keberadaan UPT PPA Provinsi Kalimantan Tengah	Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya unit layanan terhadap kekerasan perempuan dan anak.	Sudah terbentuknya UPT Provinsi dan beberapa UPT kabupaten yang memacu pemenuhan kebutuhan SDM sesuai kualifikasi

ISI “Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”					
Misi 4 Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berdaya Saing dengan tujuan Meningkatkan Kualitas SDM					
NO.	PERMASALAHAN PELAYANAN DP3APPKB	FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
		PENGHAMBAT	PENDORONG	PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Tingginya tingkat pernikahan pada usia anak	Tingkat kesadaran usia untuk berkeluarga yang masih rendah akibat dari rendahnya ekonomi keluarga	Sebagai <i>leading sector</i> terkait anak akan memudahkan koordinasi dengan lintas sektor dan SKPD terkait	Belum optimalnya pendewasaan usia pernikahan	Adanya kebijakan dalam upaya penghapusan /pendewasaan usia perkawinan anak
2	Menurunnya rasio pemakaian kontrasepsi.	Budaya dan agama tertentu yang tidak menyetujui tentang penggunaan kontrasepsi	Adanya komitmen dari Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun kabupaten/kota terhadap pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB Pascasalin Metode Konsumsi Jangka Panjang (MKJP)	Tersedianya tenaga medis/bidan di seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Pengukuran tingkat capaian kinerja DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 dengan realisasinya.

Secara umum sasaran strategis yang ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat beberapa sasaran strategis yang belum mencapai target yang ditetapkan. Terhadap sasaran yang belum mencapai target yang ditetapkan akan dianalisis dan dievaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dimasa mendatang. Tingkat capaian kinerja DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel berikut sebagai berikut

Tabel 2.3.
Tingkat capaian kinerja DP3APPKB Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2022

No	Sasaran	Tingkat Capaian (%)
1.	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) - Persentase ARG pada belanja langsung APBD	100,219% 98,542%
2.	Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	103,56%
3.	Meningkatkan pemenuhan Hak dan Perlindungan terhadap anak - Indeks Perlindungan Anak (IPA) - Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	100% 100%
4.	Mengoptimalkan kualitas data pada DinasP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	150%
5.	Meningkatkan kualitas keluarga - Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) - Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) - Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)	89,53 93,75 105
6.	Meningkatnya akseptor KB - Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mPCR) - Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	91,72 27,62
7.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	BB
JUMLAH		96,36%

Dalam rangka melaksanakan pelayanan kinerja DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Susunan Organisasinya Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut :

Kepala Dinas , membawahi 1 (satu) Sekretaris dan 5 (lima) Bidang.

a. Sekretaris, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian :

- Sub Bagian Penyusunan Program;
- Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b. Bidang Kesetaraan Gender, membawahi 3 (tiga) Seksi :

- Seksi Pemantapan Kelembagaan PUG;
- Seksi Pemantauan dan Evaluasi PUG;
- Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan.

c. Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat , membawahi 3 (tiga) Seksi:

- Seksi Data;
- Seksi Penyebarluasan Informasi;
- Seksi Partisipasi Masyarakat.

d. Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak, membawahi 3 (tiga) Seksi :

- Seksi Tumbuh Kembang Anak;
- Seksi Perlindungan Anak;
- Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Anak.

e. Bidang Perlindungan Hak Perempuan, membawahi 3 (tiga) Seksi :

- Seksi Perlindungan Perempuan
- Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga;
- Seksi Standarisasi Lembaga Layanan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

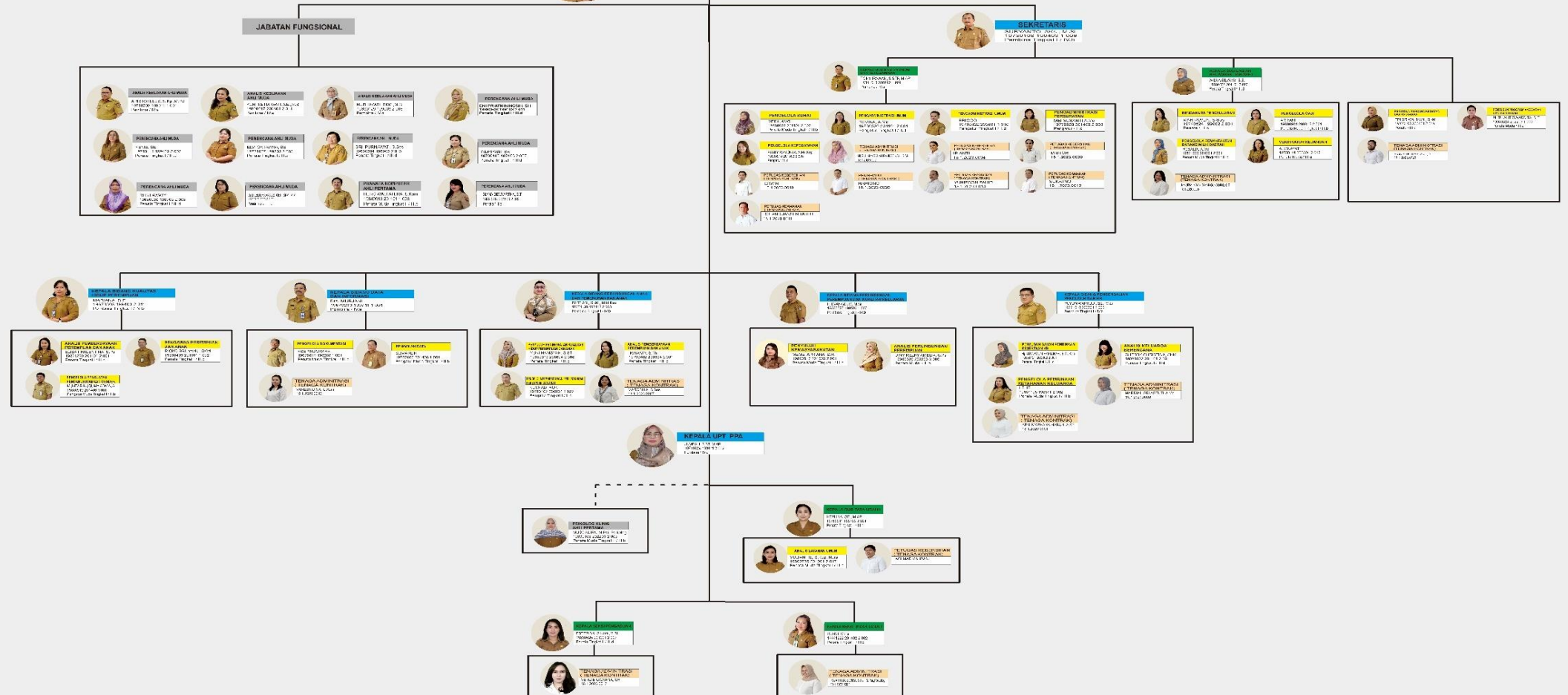
f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi 3 (tiga) Seksi

- Seksi Pengendalian Penduduk;
- Seksi Kesehatan Reproduksi;
- Seksi Keluarga Berencana.

Dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.20 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan klasifikasi A, dengan susunan sebagai berikut :

- UPT –PPA adalah unsur pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah
- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Pengaduan
- Seksi Tindak Lanjut Kasus
- Kelompok Jabatan Fungsional

- PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
- PERATURAN GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELINDUNGAN PEREMPUN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



2.3.2 Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

A. Permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

- Masih banyaknya kebijakan operasional pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak dan keluarga berencana yang masih perlu ditelaah dan disinergikan;
- Masih kurangnya pedoman dan petunjuk teknis bidang pemberdayaan perempuan, anak, ketahanan keluarga, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, perlindungan perempuan dan anak serta kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan dan anak;
- Masih lemahnya koordinasi baik lintas sektor maupun lintas program dalam rangka pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana;
- Masih lemahnya pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan, kualitas hidup, perlindungan kadilam dan hak asasi serta kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan dan anak;
- Kurangnya koordinasi dan kerjasama secara internal sehingga beberapa pekerjaan menyangkut data yang berhubungan dengan masing-masing tupoksi tidak bisa dikerjakan dengan cepat;
- Kurangnya fasilitas kerja sehingga pekerjaan yang penting sering tidak bisa dikerjakan dengan cepat bahkan terlambat, sehingga dapat menghambat persiapan maupun pelaksanaan kegiatan;
- Perlunya menanamkan persepsi masyarakat tentang Pengarusutamaan gender, Perlindungan Terhadap perempuan dan anak perlindungan melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi, pelatihan dan pembinaan secara teratur sehingga masyarakat sadar akan pentingnya hal tersebut dalam aspek kehidupan terutama pembangunan yang berkeadilan. Oleh karena itu secara khusus Bidang PUG, Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar dapat terus berinovasi untuk membuat perencanaan program kegiatan .

B. Hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi

- Koordinasi yang masih fersial sehingga menghambat dalam proses pelayan publik;
- Tingkat pemahaman aparaturnya pelaksanaan pelayanan terhadap tugas dan fungsi belum maksimal;
- Inovasi dan kreatifitas dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Kepedulian terhadap tugas dan tanggung jawab pelaksanaan tugas yang belum terwujud dengan baik;
- Kurangnya koordinasi dan kerjasama secara internal sehingga beberapa pekerjaan menyangkut data yang berhubungan dengan masing-masing tupoksi tidak bisa dikerjakan dengan cepat;
- Penempatan Pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya;
- Kurangnya pendanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan

C. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

- Tanggung jawab terhadap kemajuan daerah melalui proses pembangunan yang berkelanjutan akan mengalami proses yang panjang untuk terlaksana.
- Upaya pengawasan terhadap persaingan bebas yang berbasis ekonomi kerakyatan perlu peningkatan
- Jaminan kemudahan sebagai bentuk menciptakan kepercayaan timbal balik pemerintah dan masyarakat belum maksimal dikarenakan hal ini sangat menentukan penilaian masyarakat tentang pelayanan dari aparaturnya negara dan keberhasilan Kepala Daerah khususnya.

D. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Tantangan

- Dengan adanya Kesenjangan/Ketidaksetaraan sangat penting untuk melakukan review peraturan perundang-undangan agar tidak bias gender dan tidak diskriminasi
- Konflik peran sangat mempengaruhi strategi perlindungan perempuan dan anak
- Disparitas Indeks Pembangunan Gender antar wilayah yang menunjukkan angka yang bervariasi, namun antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah hal itu belum maksimal digambarkan/dipetakan.

- Masih tingginya angka kemiskinan merupakan tantangan tersendiri bagi peningkatan IPG
- Meningkatnya kasus kekerasan pada Anak dan Perempuan
- Keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, maupun peran dan partisipasi dalam politik masih belum maksimal, hal ini ditunjukkan dengan rendahnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis di berbagai level
- Masih rendahnya keterlibatan lintas sektor dalam Pengarus Utama Gender (PUG)
- Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi
- Pengaruh perkembangan teknologi informasi yang cepat memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak dan remaja
- Tingkat kesertaan PUS untuk berkeluarga berencana yang masih rendah
- Meningkatnya keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I
- Kemandirian ekonomi untuk KB bagi anggota UPPKS di Kabupaten/Kota belum tampak
- Belum optimalnya institusi-institusi masyarakat dalam melaksanakan program KB

Peluang

- Menguatnya isu Gender
- Banyaknya dukungan dari masyarakat terhadap program PUG dan PUHA
- Banyaknya jumlah penduduk perempuan yang mendorong banyaknya SDM Perempuan yang potensial
- Tersedianya Organisasi-organisasi yang peduli akan pemberdayaan perempuan
- Dibentuknya UPT Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai tempat pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan Anak di Kalimantan Tengah
- Banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta, yang memiliki perhatian terhadap masalah perlindungan perempuan dan anak serta remaja

- Adanya peraturan perundang-undangan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
- Dukungan Pemerintah Daerah dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
- Kemajuan teknologi informasi
- Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mendukung keluarga berencana
- Tersedianya advokasi, fasilitasi, koordinasi dan KIE program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta kesehatan reproduksi.
- Banyaknya lembaga organisasi masyarakat yang peduli terhadap keluarga berencana untuk meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga
- Kemudahan informasi tentang KB
- Animo masyarakat untuk ber KB cukup tinggi
- Adanya kewenangan Pemerintah Daerah di bidang KB dan PP sesuai PP Nomor 38 tahun 2007

Kekuatan

- Adanya regulasi yang mendukung kegiatan di DP3APP-KB (SOP, SPM, Perda, Pergub dll)
- Komitmen pimpinan yang kuat untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga bisa memacu bawahan untuk bekerja lebih optimal
- SDM dari latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja
- Tersedianya dukungan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan
- Terbentuknya jejaring kelembagaan
- Koordinasi yang baik dengan Kabupaten/kota dan SKPD terkait
- Dukungan lintas Sektor yang terkait dalam perlindungan perempuan dan anak di Kalimantan Tengah
- Terbentuknya UPT Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Tengah

Kelemahan

- Kurang optimalnya sarana dan prasarana
- koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan SKPD terkait masih belum optimal
- *Reward and Punishment* belum berjalan optimal
- Data dan informasi teknologi tepat guna belum tersedia secara komprehensif
- Kreativitas dan inovasi Program/Kegiatan yang kurang optimal
- Kualitas dan kompetensi SDM belum optimal
- Anggaran masih terbatas
- Tupoksi masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal
- Belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis, dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan
- Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan PUG dan banyaknya peraturan perundang undangan yang bias gender
- Masih rendahnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan untuk mewujudkan serta mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia dalam pembangunan

E. Isu-isu strategis DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah lima tahun ke depan, meliputi :

Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

1. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan :
 - a. meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan
 - b. meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO
 - c. meningkatkan efektivitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan
2. Perlindungan Anak :

- a. meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup
- b. penguatan sistem perlindungan anak mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya
- c. peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak
- d. Pekainan Usia Anak tertinggi no 2 di Indonesia

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Meningkatkan koordinasi antar stakeholder pelaksana kebijakan KB KS di Provinsi Kalimantan Tengah terutama sinkronisasi data pelaksanaan KB di Kabupaten/Kota
2. Meningkatkan sinergitas kebijakan pembangunan kependudukan dan KB melalui sosialisasi dan advokasi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat
3. Meningkatkan dukungan sarana, prasarana dan anggaran yang memadai untuk program KB melalui APBD
4. Meningkatkan kesadaran masarakat terutama PUS untuk menjadi akseptor KB
5. Meningkatkan layanan terhadap permasalahan kesehatan reproduksi perempuan dan remaja
6. Meningkatkan fungsi keluarga sebagai institusi penlindung anak-anak untuk berkembang

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 adalah tahapan pertama dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.

RKPD memuat evaluasi pelaksanaan evaluasi pelaksanaan evaluasi RKPD tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, dan rencana program dan kegiatan priorotas daerah. RKPD pada dasarnya berfungsi sebagai penjabaran RPJMD. Dengan demikian,

penyusunan RKPD berpedoman kepada RPJMD, namun tetap mempertimbangkan dinamika permasalahan dan isu-isu pembangunan mutakhir. Capaian kinerja RKPD selama 5 (lima) tahun harus dapat menjawab dan mencapai visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana telah dijabarkan dalam RPJMD.

RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang telah ditetapkan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, dengan mengacu pada arah pembangunan tahunan 2021-2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2018. Disatu sisi, penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah 2024 ini memperhatikan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022. RKPD menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan mengacu kepada RKPD Provinsi Kalimantan Tengah dan Renstra DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah maka DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan memperhatikan kepada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Dalam melaksanakan review rancangan akhir RKPD proses yang dilakukan adalah membandingkan antara rancangan akhir RKPD tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan banyak terdapat perbedaan antara lain :

- Tidak semua kegiatan yang ada dalam rancangan akhir RKPD dapat dilaksanakan
- Terdapat beberapa indikator kinerja yang harus disesuaikan
- Besarnya dana dalam rancangan akhir RKPD
- *Adanya program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rencana Akhir RKPD**

Untuk lebih jelasnya review rancangan RKPD tahun 2024 terhadap hasil analisa kebutuhan pada DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada **Tabel 2.3.** sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Review terhadap rancangan akhir RKPD tahun 2024
Provinsi Kalimantan Tengah

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA HASIL PROGRAM	TARGET CAPAIAN	PAGU RKPD TAHUN 2024	PAGU RANCANGAN AKHIR TAHUN 2024
1	2	3	4	5	6
1.	01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
	2.08 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			16.860.474.119	16.681.348.620
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (%)	100%	12.214.000.558	12.933.311.102
	2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	251.469.756	437.670.647
	2.08.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen RENJA SKPD	1	36.553.877	45.453.877
	2.08.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD	1	28.946.077	31.046.968
	2.08.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen LAKIP SKPD	1	31.516.476	31.516.476
	2.08.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Rapat Koordinasi Perencanaan dan Rapat Evaluasi dengan Kab/Kota se-Kalimantan Tengah	1	154.453.326	329.653.326
	2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	7.326.232.541	7.726.181.437
	2.08.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12	7.240.577.937	7.640.526.833
	2.08.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan SKPD	1	13.577.302	13.577.302
	2.08.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Dokumen Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik SKPD	1	72.077.302	72.077.302
	2.08.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100	31.231.906	31.231.906

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA HASIL PROGRAM	TARGET CAPAIAN	PAGU RKPD TAHUN 2024	PAGU RANCANGAN AKHIR TAHUN 2024
1	2	3	4	5	6
	2.08.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah bulan penyediaan	12	31.231.906	31.231.906
	2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	70.873.906	70.873.906
	2.08.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah bulan penyediaan	12	70.873.906	70.873.906
	2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	1.411.411.281	1.387.688.438
	2.08.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan	12	29.537.132	23.937.132
	2.08.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan	12	43.033.129	72.033.129
	2.08.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan	12	38.033.129	51.388.771
	2.08.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan penyediaan	12	42.283.129	26.120.100
	2.08.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah bulan penyediaan	12	33.033.129	60.133.129
	2.08.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan	12	772.248.504	920.942.077
	2.08.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah bulan penyediaan	12	453.243.129	233.134.100
	2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah (%)	100	1.265.909.794	1.147.358.412
	2.08.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset SKPD (Tahun)	1	1.106.293.841	918.031.362
	2.08.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Tahun)	1	159.615.953	229.327.050
	2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	1.745.799.468	1.701.341.092
	2.08.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan	12	12.077.302	12.077.302
	2.08.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan	12	540.622.464	319.577.648
	2.08.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Melebihi Pagu Validasi	Jumlah bulan penyediaan	12	1.193.099.702	1.369.686.142
	2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)	100	111.071.906	430.965.264

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA HASIL PROGRAM	TARGET CAPAIAN	PAGU RKPD TAHUN 2024	PAGU RANCANGAN AKHIR TAHUN 2024
1	2	3	4	5	6
	2.08.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan penyediaan	12	60.615.953	108.004.900
	2.08.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan penyediaan	12	50.455.953	57.645.953
	2.08.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	1	-	265.314.411
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah Focal Point PUG SKPD di Provinsi Kalimantan Tengah	35	1.609.201.977	1.074.393.501
	2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	1	201.335.313	199.043.476
	2.08.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen ARG SKPD	25	74.278.437	74.278.437
	2.08.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Monev PUG di Kab/ Kota	9	74.278.437	71.986.600
	2.08.02.1.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Dokumen Hasil Rakor	1	52.778.439	52.778.439
	2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi	1	1.366.588.225	838.324.225
	2.08.02.1.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Dokumen Hasil Kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	5	1.263.278.437	730.609.237
	2.08.02.1.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Dokumen Hasil Promosi	3	103.309.788	107.714.988
	2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	1	41.278.439	37.025.800
	2.08.02.1.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan UMKM Menengah yang dilatih	30	41.278.439	37.025.800

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA HASIL PROGRAM	TARGET CAPAIAN	PAGU RKPD TAHUN 2024	PAGU RANCANGAN AKHIR TAHUN 2024
1	2	3	4	5	6
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan	90	1.132.536.131	552.052.238
	2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak	1	600.159.204	172.690.311
	2.08.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten yang SDM nya terlatih dalam Bimbingan Tekhnis dan Supervisi Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dan TPPO	9	50.362.102	50.362.102
	2.08.03.1.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	9	549.797.102	122.328.209
	2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan Layanan korban kekerasan	1	230.059.781	230.059.781
	2.08.03.1.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya barang dan jasa penunjang pelayanan korban kekerasan perempuan dan anak pada UPT PPA	12	137.098.679	137.098.679
	2.08.03.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Dokumen pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan	1	92.961.102	92.961.102
	2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	1	302.317.146	149.302.146
	2.08.03.1.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang terlatih sebagai Tenaga Pendamping Korban Kekerasan dan pendataan kasus melalui aplikasi simfoni	50	102.317.146	102.317.146
	2.08.03.1.03.03 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Kebutuhan Spesifik Perempuan	2	200.000.000	46.985.000
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumah peserta Pelatihan Usaha Perempuan Korban Kekerasan	45	160.698.705	258.521.078
	2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang membentuk forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	1	75.974.227	73.796.600

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA HASIL PROGRAM	TARGET CAPAIAN	PAGU RKPD TAHUN 2024	PAGU RANCANGAN AKHIR TAHUN 2024
1	2	3	4	5	6
	2.08.04.1.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang membentuk forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	12	75.974.227	73.796.600
	2.08.04.1.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan pelayanan baginkeluarga dalam mewujudkan KG lintas prov dan kab/kota	1	84.724.478	184.724.478
	2.08.04.1.03.01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG lintas prov dan kab/kota	1	84.724.478	184.724.478
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dokumen hasil program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	13	222.609.900	217.530.460
	2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen pelaksanaan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	1	222.609.900	217.530.460
	2.08.05.1.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Dokumen laporan hasil publikasi data gender dan anak dan laporan Pengembangan Layanan Keterbukaan informasi Publik.	2	69.502.450	66.673.010
	2.08.05.1.01.02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Dokumen profil data terpliah gender tingkat provinsi	1	153.107.450	150.857.450
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Peningkatan Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria KLA	10	931.804.413	637.058.913
	2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Persentase Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria KLA	71,42	574.409.706	282.855.606
	2.08.06.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Dokumen hasil pelaksanaan Pembinaan dan Bimbingan Pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak	1	74.409.706	208.445.900
	2.08.06.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen hasil Monitoring Evaluasi Pencapaian dan Pelaksanaan KLA	1	500.000.000	74.409.706
	2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	1	357.394.707	354.203.307

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA HASIL PROGRAM	TARGET CAPAIAN	PAGU RKPD TAHUN 2024	PAGU RANCANGAN AKHIR TAHUN 2024
1	2	3	4	5	6
	2.08.06.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen hasil Rakornas FAN	1	107.394.707	104.203.307
	2.08.06.1.02.04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil Rapat Koordinasi Forum Anak Provinsi (Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi)	1	250.000.000	250.000.000
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Anak dari tindak kekerasan (%)	60	589.622.435	1.008.481.328
	2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak	1	96.126.741	514.985.634
	2.08.07.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1	96.126.741	96.126.741
	2.08.07.1.01.04 Penguatan Kerjasama Lintas Perangkat Daerah untuk Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak dan DRPPA Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu Kewenangan Provinsi	14	-	418.858.893
	2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi	1	493.495.694	493.495.694
	2.08.07.1.02.01 Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dokumen pelaksanaan kegiatan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	1	121.578.742	121.578.742
	2.08.07.1.02.06 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dokumen pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	1	371.916.952	371.916.952
2	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			2.266.669.836	1.048.527.282
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran Total/total fertility Rate (TFR)	2	202.446.846	202.446.846
	2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk	1	202.446.846	202.446.846
	2.14.02.1.01.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen hasil Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	1	151.984.773	151.984.773
	2.14.02.1.01.03 Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Dokumen hasil Advokasi dan Sosialisasi GDPK	1	50.462.073	50.462.073

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA HASIL PROGRAM	TARGET CAPAIAN	PAGU RKPD TAHUN 2024	PAGU RANCANGAN AKHIR TAHUN 2024
1	2	3	4	5	6
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	5	64.222.990	64.222.990
	2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen hasil pengembangan design program, pengelolaan dan pelaksanaan Advokasi, KIE, Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	1	27.883.045	27.883.045
	2.14.03.1.01.02 Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah kegiatan KIE PP,KB dan Pembangunan Keluarga	2	27.883.045	27.883.045
	2.14.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Dokumen Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1	36.339.945	36.339.945
	2.14.03.1.02.03 Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK	Dokumen hasil Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK	1	36.339.945	36.339.945
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	64,55	2.000.000.000	781.857.446
	2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen hasil pelaksanaan pelaksanaan design program pembangunan keluarga	1	2.000.000.000	781.857.446
	2.14.04.1.01.14 Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Kabupaten / Kota yang mendapatkan Fasilitasi, Pembimbingan , Pengembangan dan Penguatan Pengasuhan 1000 HPK	3	2.000.000.000	781.857.446
GRAND TOTAL				19.127.143.955	17.729.875.902,0

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

forum OPD sebagai sarana dua arah atau wadah organisasi dalam memberikan ruang bagi masyarakat, stakeholders, lembaga dinas/ instansi terkait dalam berdiskusi dan bermusyawarah untuk menyusun dan merencanakan program kerja pembangun untuk tahun 2024. Sebagai OPD yang menangani dan terkait terhadap isu-isu strategis pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, Rancangan rencana kerja DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah didiskusikan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

Pada forum OPD terdapat usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah selaku Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan SKPD kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Usulan-usulan tersebut disajikan pada **Tabel 2.4** :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari pemangku Kepentingan tahun 2024
Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Sumber Usulan	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
1.	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 2.08.04.1.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi 2.08.04.1.01.02 - Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan Melalui Peningkatan Kelompok Usaha Perempuan	Kalimantan Tengah	Kecamatan	8	Kabupaten Lamandau	
2	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 2.08.06.1.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 2.08.06.1.02.03 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Kalimantan Tengah	Kecamatan	8	Kabupaten Lamandau	

No.	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Sumber Usulan	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 2.08.04.1.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi 2.08.04.1.01.02 - Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan Melalui Peningkatan Kelompok Usaha Perempuan	Kalimantan Tengah	Kecamatan	8	Kabupaten Lamandau	
4	"2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 2.08.06.1.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 2.08.06.1.02.03 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi" SEMINAR LOKAL KOTA LAYAK ANAK (SEMILOKA)	Kalimantan Tengah	Kegiatan	1	Kabupaten Kapuas	
5	"2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 2.08.07.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2.08.07.1.03.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi" SOSIALISASI TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT	Kalimantan Tengah	Kegiatan	4	Kabupaten Kapuas	

No.	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Sumber Usulan	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 2.08.04.1.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi 2.08.04.1.01.01 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota SOSIALISASI TENTANG PENCEGAHAN PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR	Kalimantan Tengah	Kegiatan	7	Kabupaten Kapuas	
7	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 2.08.02.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi 2.08.02.1.03.03 - Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Kalimantan Tengah	Kecamatan	8	Kabupaten Lamandau	
8	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 2.08.03.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi 2.08.03.1.03.02 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi PSIKOEDUKASI BAHAYA SEX BEBAS DAN NARKOBA	Kalimantan Tengah	Kegiatan	4	Kabupaten Kapuas	

No.	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Sumber Usulan	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 2.08.03.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2.08.03.1.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi SEMINAR PENCEGAAN KEKERASAN DALAM KELUARGA DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF	Kalimantan Tengah	Kegiatan	1	Kabupaten Kapuas	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Kemeneterian PPPA

Kementerian PPPA merupakan bagian dari Kabinet Kerja periode 2019–2024 yang akan melaksanakan agenda kerjanya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019–2024. RPJMN merupakan himpunan dari aspirasi rakyat dan penjabaran dari Visi dan Misi Presiden RI yang telah dijanjikan pada masa kampanye Pemilu Presiden RI pada tahun 2019.

Visi Kementerian PPPA

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Presiden tahun 2020-2024 yaitu: "Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong". Untuk mewujudkan visi Presiden tersebut, ditempuh 9 (sembilan) misi, yaitu sebagai berikut:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Visi Kemen PPPA harus memperhatikan visi dan misi Presiden. Memperhatikan visi Presiden terpilih tersebut, maka Kemen PPPA sesuai dengan tugas dan fungsinya menetapkan visi Kemen PPPA tahun 2020-2024 yaitu: "Kementerian yang PEDULI (Profesional, Ekuil, Dedikasi, Unggul, Loyal, dan Integritas) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong".

Misi Kementerian PPPA

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Penyusunan misi Kemen PPPA Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada misi Presiden nomor 1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), 3 (Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan), dan 6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya).

Dalam rangka mewujudkan visi Kemen PPPA, ditetapkan misi sebagai berikut:

4. peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dari kekerasan termasuk TPPPO;
5. peningkatan perlindungan anak; dan
6. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tujuan adalah penjabaran visi kementerian yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden (Bappenas, 2014). Perumusan tujuan Kemen PPPA mendasarkan pada RPJMN tahun 2020-2024 dengan memperhatikan tugas dan fungsi Kemen PPPA, dan amanat peraturan perundang-undangan terkait.

Penyusunan tujuan Kemen PPPA perlu memperhatikan Agenda pembangunan nasional. Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, terdapat 7 agenda pembangunan nasional yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut:

1. ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Kemen PPPA mendukung Prioritas Nasional (PN) ke-3 yaitu “Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”, khususnya Program Prioritas (PP) ke-5 yaitu “Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda”, Kegiatan Prioritas (KP) ke-1 yaitu “Pemenuhan hak dan perlindungan anak”, dan Kegiatan Prioritas (KP) ke-2 yaitu “perlindungan

perempuan”. Sasaran nasional yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda dengan indikator nasional yang harus dicapai yaitu:

1. Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
3. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
4. Indeks Perlindungan Anak (IPA)
5. Persentase ARG pada belanja langsung APBD

Penyusunan tujuan Renstra Kemen PPPA juga memperhatikan 5 arahan presiden, yaitu:

1. peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan;
2. peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan Anak;
3. penurunan ke kelasan terhadap perempuan dan anak;
4. penurunan pekerja anak; dan
5. pencegahan perkawinan anak.



Gambar 3.1 Skema Perumusan Tujuan Kemen PPPA

Dimana Indikator kinerja masing-masing tujuan merupakan Indikator Utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

Tabel 3.1

Indikator Kinerja Utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

No	TUJUAN
	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
3.	TPAK Perempuan
4.	Indeks PUG Nasional
5.	Indek Perlindungan Anak (IPA)
6.	Proporsi Perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun
7.	Jumlah Kabupaten/Kota dengan peringkat menuju KLA
8.	Prosentasi balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak
9.	Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat
10.	Indeks Kualitas Keluarga
11.	Prevalensi Perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komperenhensip (SPHPN dan Simponi)
12.	Persentasi pemula yang menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar
13.	Prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (SNPHAR 2018)
14.	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan Komperensif (SNPHAR dan Simponi)
15.	Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja
16.	Indek Reformasi Birokrasi
17.	Opini BPK atas Laporan Keuangan
18.	Tingkat Maturitas SPIP
19.	Nilai SAKIP

Sasaran Strategis Kementerian PPPA

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program (Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019). Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kemen PPPA telah dirumuskan Indikator

Kinerja Sasaran Strategis. Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019).

Tujuan Kemen PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

A. Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu 2. Persentase Anggaran Responsif Gender pada Belanja Langsung APBD dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

B. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu Indeks Perlindungan Anak (IPA) dan Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif.

C. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PPPA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

D. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif.

E. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu Indeks Perlindungan Anak (IPA) dan Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif.

F. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kemen PPPA. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- Indeks Reformasi Birokrasi;
- Opini BPK atas Laporan Keuangan;
- Tingkat Maturitas SPIP; dan
- Nilai SAKIP.

3.1.2 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Agenda pembangunan nasional selama 20 tahun telah di tuangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yang merupakan acuan, arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan keberlanjutan dari pembangunan sebelumnya. Saat ini Indonesia memasuki periode terakhir RPJMN IV tahun 2020-2024, dimana visi dan misi pembangunan dalam RPJPN menjadi landasan sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Lebih lanjut sebagaimana tertera dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia 2. Pembangunan Infrastruktur 3. Penyederhanaan Regulasi 4. Penyederhanaan Birokrasi, dan 5. Transformasi Ekonomi.

RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, Visi Misi dan 5 (lima) arahan

utama Presiden menjadi landasan utama RPJMN 2020-2024, yang selanjutnya diterjemahkan kedalam 7 agenda pembangunan (Prioritas Nasional/PN). Dalam hal ini, BKKBN diberi mandat untuk turut berkontribusi secara langsung pada PN “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdayasaing”, dan PN “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”, dengan penjabaran sebagai berikut:

- a. Prioritas Nasional (PN) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdayasaing;
 - 1) Program Prioritas (PP) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, dengan KP; 1) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan, dan 2) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.
 - 2) PP Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, dengan KP; Kesejahteraan Sosial.
 - 3) PP Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan KP;
 - 1) Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi, dan 2) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat.

Dari Program Prioritas tersebut, BKKBN memiliki kontribusi terhadap KP Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, KB dan Kesehatan Reproduksi, dengan fokus strategi untuk:

 - a). peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga khususnya pengasuhan, tumbuh kembang anak dan gizi;
 - b). perluasan cakupan KB dan kesehatan reproduksi berkualitas sesuai karakteristik wilayah melalui penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah;
 - c). peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan reproduksi bagi remaja dan praremaja yang responsif gender;
 - d). peningkatan kompetensi PKB/PLKB;
 - e). penguatan jejaring dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi khususnya praktik mandiri bidan, dokter swasta dan organisasi profesi; dan
 - f). penguatan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Program Bangga Kencana serta konseling KB dan Kesehatan Reproduksi secara komprehensif.

- b. Prioritas Nasional (PN) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan: PP Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter, dengan KP Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter sejak usia dini. Dari KP tersebut, BKKBN berkontribusi melalui beberapa fokus strategi, diantaranya:
- 1) Peningkatan pemahaman peran keluarga yang memiliki anak remajadalam pengasuhan dan pembentukan karakter remaja.
 - 2) Peningkatan penyampaian informasi dan edukasi pada remaja dalam pembentukan karakter.
 - 3) Peningkatan pemahaman keluarga dalam pola pengasuhan dan pendampingan anak sejak usia dini.
 - 4) Penguatan pemberdayaan ekonomi keluarga guna meningkatkan kualitas keluarga.

Arah kebijakan dan strategi BKKBN secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024, terutama dalam menerjemahkan Prioritas Nasional melalui Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang menjadi arahan Presiden RI sebagai fokus penggarapan Pembangunan Nasional Indonesia periode 2020-2024. Adapun arah kebijakan dan strategi BKKBN adalah sebagai berikut:

- c. meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga melalui strategi:
- 1) Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga.
 - 2) Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga.
 - 3) Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluargabagi remaja.
 - 4) Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-keluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta MKJP khususnya MOP dan MOW, serta peserta KB Mandiri di wilayah Kampung KB.
 - 5) Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga rentan.
 - 6) Penguatan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia.
 - 7) Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.
- d. menguatnya pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk melalui strategi:

- 1) Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).
 - 2) Penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk.
 - 3) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan.
 - 4) Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan.
- e. meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran melalui strategi:
- 1) Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR.
 - 2) Penguatan kemitraan kualitas pelayanan KBKR.
 - 3) Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR di wilayah dan sasaran khusus.
 - 4) Peningkatan KB Pria.
 - 5) Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP).
 - 6) Peningkatan kemandirian PUS dalam ber-KB.
- f. meningkatkan Advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran, yang dapat diwujudkan melalui strategi:
- 1) Peningkatan penyebaran materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah.
 - 2) Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD.
- g. memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi, dengan strategi:
- 1) Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi Program Bangga Kencana berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan Wilayah.
 - 2) Pengembangan Smart Technology/Smart Program untuk memperkuat pengelolaan Program Bangga Kencana.

Berbagai arah kebijakan dan strategi BKKBN sebagaimana tersebut di atas tentunya memerlukan dukungan untuk membantu agar operasionalisasi Program Bangga Kencana dapat berjalan dengan baik, diantaranya:

1. Dari sisi Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Program Bangga Kencana, arah kebijakan yang diambil diantaranya untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi, serta Penguatan Kerjasama Global Program Bangga Kencana, yang dapat diwujudkan melalui strategi:

- a. peningkatan kualitas SDM Program Bangga Kencana melalui pendidikan dan pelatihan yang terstandarisasi berbasis teknologi informasi;
 - b. peningkatan kualitas, pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi Program Bangga Kencana sebagai *input*/masukan atas rumusan kebijakan;
 - c. peningkatan kemitraan dan kerjasama global di bidang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan untuk memperkuat kelembagaan.
2. Dari sisi Dukungan Manajemen, Sekretariat Utama memiliki arah kebijakan untuk dukungan manajemen yang berkualitas dalam mendukung Penyelenggaraan Program Bangga Kencana, yang dapat diwujudkan melalui strategi:
 - a. penyediaan dan sinkronisasi landasan hukum Kependudukan dan KB,
 - b. serta Pengelolaan Organisasi dan Tatalaksana;
 - c. peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan BMN;
 - d. penguatan Perencanaan Program dan Anggaran;
 - e. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur; dan
 - f. penyediaan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumah-tangga yang berkualitas.
3. Dari sisi pengawasan dan peningkatan akuntabilitas, Inspektorat Utama memiliki arah kebijakan untuk meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Program Bangga Kencana guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang akan diwujudkan melalui strategi:
 - a. mendorong pengelolaan keuangan BKKBN secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, dan efektif;
 - b. mendorong pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Reformasi Birokrasi dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh seluruh Unit Kerja Eselon I dan Perwakilan BKKBN Provinsi;
 - c. mendorong seluruh kebijakan yang ditetapkan Kepala BKKBN dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh Unit Kerja Eselon I dan Perwakilan BKKBN Provinsi; dan
 - d. mendorong pencapaian sasaran strategis BKKBN secara efektif dan efisien.

Dalam menjabarkan arah kebijakan dan strategi BKKBN sebagaimana terteradiatas, terutama dalam implemetasinya, BKKBN akan terus memperhatikan perkembangan situasi/kondisi dan isu strategis nasional serta prioritas strategi pembangunan nasional. Salah satu strategi pembangunan nasional yang perlu mendapat perhatian adalah Pengarusutamaan Gender yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan Gender merupakan isu lintas sektor yang tanggung jawab implementasinya harus didukung baik oleh Pemerintah Pusat (lintas K/L) maupun oleh Pemerintah Daerah. BKKBN berkomitmen untuk memastikan setiap orang (laki-laki dan perempuan) mendapatkan hak yang sama dalam pelayanan Program Bangga Kencana serta memperhatikan konsep Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi Program/Kegiatan Bangga Kencana yang inklusif gender.

Urusan Pemerintahan Konkuren Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 Terkait Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan pemerintahan konkuren atau urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berdasarkan pasal 12 ayat 2 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana termasuk kedalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dimana pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut

Tabel 3.2
Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO .	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN / KOTA
1.	Kualitas Hidup Perempuan	- Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat nasional - Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat nasional - Standardisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	- Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah provinsi - Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan perempuan tingkat Daerah provinsi	- Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten /kota - Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan tingkat Daerah kabupaten /kota
2.	Perlindungan Perempuan	- Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup nasional - Penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional - Standardisasi lembaga penyedia layanan	- Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten / kota - Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota	- Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota - Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN / KOTA
		perlindungan perempuan	- Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah provinsi	- Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten /kota
3.	Kualitas Keluarga	- Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat nasional. - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak tingkat nasional - Standardisasi lembaga penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak.	- Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota - Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota	- Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota - Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota
4.	Sistem Data Gender dan Anak	- Penetapan sistem data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat nasional - Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam	- Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah provinsi	- Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota

NO .	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN / KOTA
		kelembagaan data di tingkat nasional		
5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	- Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat nasional	- Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah provinsi	- Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah Kabupaten /kota

Tabel 3.3
Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN / KOTA
1.	Pengendalian Penduduk	- Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk - Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional.	- Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk - Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah provinsi	- Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk - Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota
2.	Keluarga Berencana (KB)	- Penyusunan desain program dan pengelolaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi Pengendalian penduduk - Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB) - Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan PUS nasional. - Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga - Pemberdayaan dan peningkatan peran	- Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal - Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	- Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal - Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB). - Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota - Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi

NO .	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN / KOTA
		serta Organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam - pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB		kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB
3.	Keluarga Sejahtera	- Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga - Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga	- Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga - Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	- Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga - Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
4.	Standarisasi dan Sertifikasi	- Standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB/ petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	-----	-----

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja PD Tahun 2024 PD

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah diterjemahkan dari visi dan misi Kepala Daerah Terpilih untuk periode 2021 – 2026 yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Penyelarasan dilakukan dengan mensinkronkan tujuan dan sasaran RPJMD. Selanjutnya RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah digunakan sebagaimana pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi penyusun rencana strategis SKPD.

Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026 mengacu dan mengarah bagi terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang, baik kebijakan struktur tata ruang maupun kebijakan pola tata ruang.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2021 – 2026 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah mengacu pada RPJMD Tahun 2021 – 2026, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan daerah.

Secara ringkas Substansi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

Visi

” Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta keluarga sejahtera dan berkualitas di Provinsi Kalimantan Tengah”.

Sejalan dengan visi tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesetaraan gender diberbagai bidang pembangunan
2. Meningkatkan Perlindungan terhadap perempuan dan anak
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan program keluarga berencana

Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh DP3APPKB pada 5 (lima) tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan strategis DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang dituangkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 - 2026 dirumuskan sebagai berikut :

- | | |
|----------|---|
| Tujuan 1 | Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam pembangunan |
| Tujuan 2 | Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan |
| Tujuan 3 | Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak |
| Tujuan 4 | Meningkatkan kualitas data gender dan anak |
| Tujuan5 | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Tujuan 6 | Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera |

Sasaran

Berdasarkan perumusan tujuan strategis DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, maka dirumuskan sasaran strategis searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, yang akan dicapai selama periode Renstra. Perumusan sasaran strategis dapat dirinci sebagai berikut :

- Tujuan 1 Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam pembangunan*
- Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah “*Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan Gender*” yang ditandai dengan:
- Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng
 - Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga
 - Persentase perempuan di lembaga legislatif
 - Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
- Tujuan 2 Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan*
- Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah “*Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO*” yang ditandai dengan:
- Rasio kekerasan terhadap perempuan da TPPO
“*Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO*” yang ditandai dengan:
 - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
- Tujuan 3 Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak*
- Untuk mencapai tujuan di atas, ada 2 (dua) sasaran strategis yaitu: “*Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak*” yang ditandai dengan:
- Indeks Perlindungan Anak (IPA)
 - Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama
 - Rasio anak korban kekerasan
“*Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak*”
- yang ditandai dengan:
- Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif

- Tujuan 4 Meningkatkan kualitas data gender dan anak*
- Untuk mencapai tujuan di atas sasaran strategisnya yaitu:
“Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak”
 yang ditandai dengan:
- Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak
- Tujuan 5 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
- Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya sebagai berikut:
“Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran”
 yang ditandai dengan:
- Hasil Penilaian SAKIP
- Tujuan 6 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera*
- Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah dengan :
- “Menurunnya angka kelahiran, Ketahanan Keluarga dan Stunting ”*
 yang ditandai dengan:
- Angka Kelahiran Total/ *Total Fertility Rate (TFR)*
 - Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ modern Contraceptive (mPCR)
 - Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)
 - Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (*Age Specific Fertility Rate / ASFR*)
 - Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA)

BAB IV

ENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, maka pada tahun 2024 disusun program dan kegiatan dengan berpedoman pada Nomenkalur Permendagri 90 Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan
- b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- d) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- b) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- d) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- e) Fasilitas Kunjungan Tamu
- f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- g) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b) Pengadaan Mebel
- c) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- d) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan :

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
- c) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi

Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
Sub Kegiatan :

- a) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
- b) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi

Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan :

- a) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
- b) Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

3. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Kegiatan : Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
- b) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan :

- a) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

- b) Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi Penguatan Jejaring antar Lembaga

4. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Kegiatan : Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan :

- a) Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi

Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a) Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

5. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data

Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
- b) Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi

6. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Kegiatan : Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan :

- a) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi

Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan :

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

-) Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

7. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Kegiatan : Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi

Kegiatan :

Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Kegiatan : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

Sub Kegiatan :

- a) Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
- b) Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi
- c) Advokasi dan Sosialisasi GDPK

2. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Kegiatan : Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Sub Kegiatan :

- a) Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Kegiatan : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Sub Kegiatan :

- a) Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Kegiatan : Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- b) Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- c) Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja
- d) Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK

Secara rinci Rumusan Rencana Program dan Kegiatan rencana kerja tahun 2024 memuat indikator kinerja *outcome/output* masing-masing Program/kegiatan pada DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat dalam **tabel 4.1** sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan SKPD
Tahun 2024

SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Anggaran (Rp)		
				Sebelum	Sesudah	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	2.08 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			16.986.495.773	17.036.495.773	50.000.000
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (%)	100	13.187.996.782	13.319.246.782	131.250.000
	2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	378.412.500	412.738.912	34.326.412
	2.08.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	32.573.877	32.573.877	-
	2.08.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA	1	31.046.968	31.046.968	-
	2.08.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	31.516.476	31.516.476	-
	2.08.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	umlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	283.275.179	317.601.591	34.326.412
	2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	8.144.034.135	8.144.034.135	-
	2.08.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	8.069.876.833	8.069.876.833	-
	2.08.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	10.000.000	10.000.000	-
	2.08.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	64.157.302	64.157.302	-
	2.08.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	31.231.906	36.231.906	5.000.000
	2.08.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12	31.231.906	36.231.906	5.000.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Anggaran (Rp)		
				Sebelum	Sesudah	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	70.873.906	140.873.906	70.000.000
	2.08.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	70.873.906	140.873.906	70.000.000
	2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	2.145.329.323	2.306.579.323	161.250.000
	2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	23.937.132	23.937.132	-
	2.08.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	900.574.400	900.574.400	-
	2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	58.008.485	58.008.485	-
	2.08.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	1.600.000	1.600.000	-
	2.08.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	60.133.129	70.133.129	10.000.000
	2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	920.942.077	1.092.192.077	171.250.000
	2.08.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	180.134.100	160.134.100	(20.000.000)
	2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	100	284.182.506	284.182.506	-
	2.08.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1	54.855.456	54.855.456	-
	2.08.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	229.327.050	229.327.050	-
	2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.702.967.242	1.503.640.830	(199.326.412)
	2.08.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	13.703.452	13.703.452	-
	2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	319.577.648	304.577.648	(15.000.000)
	2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1.369.686.142	1.185.359.730	(184.326.412)
	2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	430.965.264	490.965.264	60.000.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Anggaran (Rp)		
				Sebelum	Sesudah	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	108.004.900	138.004.900	30.000.000
	2.08.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	57.645.953	67.645.953	10.000.000
	2.08.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	265.314.411	285.314.411	20.000.000
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah Focal Point PUG SKPD di Provinsi Kalimantan Tengah	35	1.124.855.574	1.089.855.574	(35.000.000)
	2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	1	199.043.476	199.043.476	-
	2.08.02.1.01.0005 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	25	74.278.437	74.278.437	-
	2.08.02.1.01.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	9	71.986.600	71.986.600	-
	2.08.02.1.01.0007 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	1	52.778.439	52.778.439	-
	2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	1	888.786.298	853.786.298	(35.000.000)
	2.08.02.1.02.0003 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang Keluaran politik, hukum, sosial dan ekonomi	5	781.071.310	746.071.310	(35.000.000)
	2.08.02.1.02.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	3	107.714.988	107.714.988	-
	2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	1	37.025.800	37.025.800	-
	2.08.02.1.03.0005 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	30	37.025.800	37.025.800	-
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan	90	552.052.238	526.052.238	(26.000.000)

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Anggaran (Rp)		
				Sebelum	Sesudah	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	"Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak"	1	172.690.311	172.690.311	-
	2.08.03.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	9	50.362.102	50.362.102	-
	2.08.03.1.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	9	122.328.209	122.328.209	-
	2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan Layanan korban kekerasan	1	230.059.781	230.059.781	-
	2.08.03.1.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	50	137.098.679	137.098.679	-
	2.08.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	85	92.961.102	92.961.102	-
	2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	1	149.302.146	123.302.146	(26.000.000)
	2.08.03.1.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	25	102.317.146	102.317.146	-
	2.08.03.1.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	100	46.985.000	20.985.000	(26.000.000)
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumah peserta Pelatihan Usaha Perempuan Korban Kekerasan	45*2=90 Orang	258.520.478	258.520.478	-
	2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang membentuk forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak	12	73.796.000	73.796.000	-
	2.08.04.1.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	1	73.796.000	73.796.000	-

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Anggaran (Rp)		
				Sebelum	Sesudah	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.04.1.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan pelayanan baginkeluarga dalam mewujudkan KG lintas prov dan kab/kota	1	184.724.478	184.724.478	-
	2.08.04.1.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	184.724.478	184.724.478	-
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dokumen hasil program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	13	217.530.460	217.530.460	-
	2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen pelaksanaan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	1	217.530.460	217.530.460	-
	2.08.05.1.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1	66.673.010	66.673.010	-
	2.08.05.1.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	1	150.857.450	150.857.450	-
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Peningkatan Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria KLA	10	637.058.913	637.058.913	-
	2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Persentase Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria KLA	71,42	282.855.606	282.855.606	-
	2.08.06.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1	74.409.706	24.409.706	(50.000.000)
	2.08.06.1.01.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	25	208.445.900	258.445.900	50.000.000
	2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	1	354.203.307	354.203.307	-
	2.08.06.1.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	30	104.203.307	104.203.307	-
	2.08.06.1.02.0005 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	1	250.000.000	250.000.000	-
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Anak dari tindak kekerasan (%)	60	1.008.481.328	988.231.328	(20.250.000)

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Anggaran (Rp)		
				Sebelum	Sesudah	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak	1	514.985.634	494.735.634	(20.250.000)
	2.08.07.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1	96.126.741	96.126.741	-
	2.08.07.1.01.0004 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu Kewenangan Provinsi	14	418.858.893	398.608.893	(20.250.000)
	2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi	1	493.495.694	493.495.694	-
	2.08.07.1.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	30	121.578.742	121.578.742	-
	2.08.07.1.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	30	371.916.952	371.916.952	-
2	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			998.065.209	948.065.209	- 50.000.000,00
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran Total/total fertility Rate (TFR)	2	151.984.773	151.984.773	-
	2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk	1	151.984.773	151.984.773	-
	2.14.02.1.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk	1	151.984.773	151.984.773	-
	2.14.02.1.01.0003 Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Dokumen hasil Advokasi dan Sosialisasi GDPK	1	-	-	-
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	5,18	64.222.990	36.339.945	(50.000.000)
	2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen hasil pengembangan design program, pengelolaan dan pelaksanaan Advokasi, KIE, Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	1	27.883.045	-	(27.883.045)

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Anggaran (Rp)		
				Sebelum	Sesudah	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	2.14.03.1.01.0013 Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan.	1	27.883.045		(27.883.045)
	2.14.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Dokumen Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1	36.339.945	36.339.945	-
	2.14.03.1.02.0004 Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	30	36.339.945	36.339.945	-
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	64,55	781.857.446	759.740.491	(22.116.955)
	2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen hasil pelaksanaan pelaksanaan design program pembangunan keluarga	1	781.857.446	759.740.491	(22.116.955)
	2.14.04.1.01.0017 Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	1	781.857.446	759.740.491	(22.116.955)
GRAND TOTAL				17.984.560.982	17.984.560.982	-

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (Stakeholders) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*Trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar benar dikedepankan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah disusun dalam rangka perwujudan tanggung jawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Serta memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang.

DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang bertugas dalam mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG), terlindunginya anak dan fungsi Keluaran berencana memiliki fungsi bukan sebagai pelaksana, melainkan sebagai perumus kebijakan, koordinator pelaksanaan kebijakan, advokator, fasilitator, mediator, dan inisiator dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUHA) di semua Perangkat daerah (PD) dilingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan lembaga masyarakat.

Agar setiap PD dan lembaga masyarakat tersebut dapat mengimplementasikan strategi PUG dan PUHA ke dalam setiap kebijakan, program dan kegiatannya yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasinya, maka tugas akhir yang paling mendasar dari DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah adalah mengubah mindset individu dan budaya lembaga dari buta dan bias gender menjadi sadar, sensitif, peduli, dan tanggap (responsif) gender, dan dari tidak peduli terhadap hak anak menjadi peduli anak.

Oleh karena itu, indikator outcome, terlebih lagi indikator dampak (*impact*) dari capaian layanan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan usaha dan komitmen dari seluruh stakeholder, mengingat jangka waktu yang relatif pendek (satu tahun). Selain itu, melihat visi dan misinya, maka keberhasilan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah pada hakekatnya tersebar sebagai bagian dari keberhasilan Organisasi Perangkat Daerah dan lembaga masyarakat dalam mengintegrasikan ataupun mempertimbangkan isu gender, perempuan dan anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatannya.